

Nama : Irenius Juni Nugroho  
NPM : 2313031032  
Kelas : 2023 B  
Mata Kuliah : Pemeriksaan Akuntansi / Auditing

## **TUGAS PROJEC PORTOFOLIO AUDITING**

### **JURNAL NASIONAL**

#### **IDENTITAS JURNAL**

Nama Jurnal : E-Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)  
Judul Jurnal : Penerapan Audit Berbasis IT di Era Digital: Peluang atau Tantangan?  
Volume : 1  
Nomor : 1  
Halaman : 24-33  
Tahun Terbit : 2021  
Nama Penulis : Almira Murfidyah, Amelia Nurlaily Virgitania Sunoro, Arista Amanda Putri, dan Cornelia Kristiana Putri

#### **ANALISIS JURNAL**

Perkembangan teknologi memicu munculnya sistem baru dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satunya adalah perkembangan akuntansi dimana setiap perusahaan kini menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Melihat perkembangan ini, peneliti tertarik untuk membuat artikel jurnal ini yang bertujuan untuk mengetahui penerapan audit berbasis teknologi sebenarnya menjadi sebuah peluang atau tantangan bagi seorang auditor (Murfidyah et al., 2021).

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan literature review. Data yang digunakan adalah penelitian selama 10 tahun terakhir (2010-2020) yang berkaitan dengan dampak penerapan audit berbasis teknologi informasi bagi auditor. Kemudian, penelitian terdahulu akan diekstrak lalu

dianalisis kembali untuk mendapatkan informasi mengenai peluang serta tantangan dalam penerapan audit berbasis teknologi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis didapatkan beberapa kesimpulan. Beberapa auditor menganggap penerapan audit berbasis teknologi sebagai tantangan. Para auditor menganggap bahwa audit berbasis IT menjadi tantangan karena mereka harus lebih memahami mengenai sistem komputer yang digunakan suatu perusahaan yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. Selain itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi auditor karena mereka dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan menyusun prosedur audit yang sesuai. Sejalan dengan hal tersebut dalam (Hamidah et al., 2021) menjelaskan bahwa teknologi informasi 'memaksa' auditor untuk melakukan analisis data, mengoperasikan perangkat lunak audit, keamanan cyber, memahami area dan praktik bisnis terpenting untuk pemulihan, manajemen perubahan, dan potensi serta dampak pada teknologi dan bisnis yang muncul. Selain itu, pengelolaan teknologi informasi haruslah dilakukan dengan benar karena akan berdampak pada persaingan bisnis (Adelia et al., 2021).

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, kebanyakan auditor menganggap audit berbasis teknologi menjadi peluang besar bagi mereka. Alasannya dengan audit berbasis teknologi membuat proses audit jauh lebih singkat. Selain itu, audit berbasis teknologi juga dapat meningkatkan fleksibilitas pekerjaan auditor, serta nantinya akan mengurangi biaya yang dikeluarkan akibat penugasan audit. Menurut (Fadillah et al., 2021), teknologi informasi membuat pengelolaan data audit menjadi lebih mudah karena membantu proses audit dimulai dengan persiapan informasi yang diperlukan untuk proses audit, dokumentasi pekerjaan audit, deteksi penipuan, pemantauan, pelaporan audit, dan penyimpanan semua file yang relevan. Selain itu, penggunaan komputerisasi juga meningkatkan kompetensi auditor, seperti keahlian dalam pemahaman sistem komputer, kemampuan identifikasi dan meminimalisir risiko baru serta keahlian penggunaan komputer dalam proses audit sehingga produktivitas auditor juga akan meningkat (Haniifah & Pramudyastuti, 2021). Peningkatan efisiensi audit berarti auditor semakin handal dan kompeten dalam melakukan audit, sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi dari pihak auditor, perkembangan teknologi dan informasi terhadap proses audit perlu diakui membawa pengaruh yang cukup besar. Penggunaan teknologi dan informasi tersebut dalam proses audit disebut sebagai Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Penggunaan TABK juga telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011), PSA No. 59 (SA Seksi 327) tentang Teknik Audit

Berbantuan Komputer (Fadillah et al., 2021). Teknik ini tentu saja memiliki pengaruh terhadap kualitas audit berupa opini auditor atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Namun, tak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti teknik ini akan berkembang seiring perkembangan teknologi dan informasi. Tentu saja hal ini menjadi tanda bahwa auditor harus siap dan mampu memahami teknik yang terus berkembang itu.

Penerapan audit berbasis teknologi menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi para auditor. Keduanya sisi ini tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Jika dilihat lebih dekat, melalui tantangan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat menjadi sarana auditor untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan kualitas auditor itu sendiri. Pada akhirnya, penerapan audit berbasis teknologi merupakan suatu peluang karena memberikan lebih banyak kemudahan dan juga menjadi sarana pengembangan skill dan juga pengetahuan dari auditor sendiri. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa pengelolaan teknologi harus dilakukan dengan benar serta kelengkapan dan ketersediaan kondisi fasilitas teknologi juga perlu ditingkatkan agar peluang audit berbasis teknologi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya (Ulfa, 2021).

## **IDENTITAS JURNAL**

Nama Jurnal : Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi STIE Wira Bhakti  
Makassar Internasional

Judul Jurnal : Pelaksanaan Internal Audit Atas Aktiva Tetap Pada PT. Harvest  
Mega Energi Makassar

Volume : 8

Nomor : 1

Halaman : 1-20

Tahun Terbit : 2019

Nama Penulis : Sahabuddin

## **ANALISIS JURNAL**

Entitas yang memiliki stabilitas tinggi akan menunjang kesuksesan dan menciptakan tingkat profesionalitas yang tinggi pula. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan pengawasan dan pengendalian. Namun, pengawasan dan pengendalian tidak akan cukup jika unsur-unsur di dalamnya tidak dapat dipatuhi dalam pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini, internal audit selaku pengawas fungsional dituntut untuk lebih berperan dalam melaksanakan pengujian dan pemeriksaan ketaatan fungsi lainnya dalam suatu entitas terhadap kebijaksanaan yang dibuat manajer, mendeteksi kecurangan atau penyimpangan yang terjadi, hingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan.

Pemeriksaan diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu setiap pemeriksaan harus terencana dan terkendali dengan baik. Salah satu bentuk pemeriksaaan yang baik adalah menyusun rencana penugasan dalam bentuk langkah kerja yang ada dalam program dan prosedur audit. Program dan prosedur tersebut harus dijadikan pondoman bagi auditor sehingga dapat mewujudkan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pemeriksaan.

Artikel jurnal ini membahas mengenai penelitian terhadap prosedur internal audit yang diterapkan oleh PT. Harvest Mega Energi Makassar serta menganalisis efektivitas prosedur pemeriksaan atas aktiva tetap yang digunakan oleh audit internal. PT. Harvest Mega Energi Makassar sendiri bergerak di bidang pendistribusian cat. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan juga data sekunder. Sementara itu, metode yang digunakan adalah observasi, interview, da juga dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komperatif dimana peneliti menganalisa temuan yang diperoleh selama mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mengadakan

perbandingan antara pelaksanaan audit intern pada PT. Harvest Mega Energi Makassar dengan pelaksanaan menurut teori audit intern.

PT. Harvest Mega Energi Makassar sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian cat akan memerlukan aktiva tetap dalam melaksanakan kegiatannya. Aktiva tetap berperan sangat penting bagi perusahaan ini yang mana dapat dilihat dari jumlah relatif dari seluruh komponen aktiva tetap yang dimiliki. Jika ditinjau dari sifatnya, aktiva tetap mempunyai peranan yang krusial karena dipergunakan dalam periode yang panjang tergantung pada masa manfaat atau hasil yang diberikan kepada entitas yang bersangkutan. Beberapa macam aktiva tetap berwujud yang digunakan oleh perusahaan ini, diantaranya tanah, bangunan dan sarana, kendaraan, serta perabot dan inventaris kantor.

Metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan ini adalah metode penyusutan garis lurus. Penggunaan metode penyusutan garis lurus adalah alokasi harga perolehan tetap berwujud yang dihitung sesuai dengan berlakunya waktu sampai jumlah biaya penyusutan periode selalu sama besarnya, sepanjang umur aktiva tetap perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, selama masa penggunaan aktiva tetap diperlukan pengeluaran biaya baik sebagai eksploitasi yang sifatnya rutin, maupun biaya-biaya yang dikeluarkan jika ada perbaikan/perubahan sebagian besar komponen dari pada aktiva tetap yang bersangkutan. Perusahaan menempuh kebijaksanaan dengan adanya pengakuan pengeluaran biaya yang berhubungan dengan setiap jenis aktiva tetap yang dimiliki sekarang, tidak berhenti sampai aktiva tetap itu diperoleh. Meskipun biaya yang diperlukan tidak sedikit, biaya yang dikeluarkan untuk komponen aktiva tetap yang bersangkutan akan dilihat dari tingkat kerusakan yang dialami. Jika dilihat dari data yang disajikan oleh peneliti dapat diketahui pula bahwa kebijaksanaan ini bukanlah agenda yang bersifat rutin, dimana memiliki arti bahwa bukan setiap tahun perbaikan ini diadakan tetapi tergantung pada kondisi setiap aktiva tetap yang digunakan.

Pengendalian internal aktiva tetap berwujud di PT. Haverst Mega Energi Makassar dimulai saat adanya perencanaan dan persetujuan pengeluaran modal dalam suatu jumlah tertentu untuk keperluan penambahan atau perbaikan aktiva tetap yang dipergunakan dalam proses kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan dimana jika modal yang dikeluarkan jumlahnya besar atau melampaui batas Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), maka harus mendapat persetujuan dari direksi, sedangkan pengeluaran modal dibawah jumlah tersebut diatas cukup mendapatkan persetujuan dari manajemen perusahaan. Alasan

kebijakan ini adalah sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan modal usaha.

PT. Haverst Mega Energi Makassar juga menempatkan auditor internal tak hanya sebagai pengawas pelaksanaan sistem pengendalian internal aktiva tetap, tetapi juga memiliki peran untuk memperbaiki kelemahan atau penyimpangan yang terjadi dalam pengendalian internal tersebut. Jika auditor menemukan tanda-tanda penyimpangan, maka auditor dapat melakukan koreksi atau dengan kata lain dapat menaikkan harga perolehan aktiva tetap.

Menurut pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, PT. Haverst Mega Energi Makassar telah melakukan pengendalian internal aktiva tetap dengan baik dan tersusun secara sistematis. Kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan ini juga mendukung pengendalian internal yang baik sehingga meningkatkan stabilitas perusahaan. Beberapa kebijakan yang diambil oleh perusahaan, seperti adanya perencanaan dan persetujuan pengeluaran modal dalam suatu jumlah tertentu serta penempatan auditor internal baik sebagai pengawas sekaligus pengoreksi penyimpangan aktiva tetap.

## **IDENTITAS JURNAL**

Nama Jurnal : Bilancia  
Judul Jurnal : Perceptions of Financial Auditors On The Use of Computer Assisted Audit Techniques  
Volume : 5  
Nomor : 3  
Halaman : 297-307  
Tahun Terbit : 2021  
Nama Penulis : Atika Ulfa

## **ANALISIS JURNAL**

Perkembangan sistem informasi kini sudah menghinggapi seluruh aspek kehidupan. Hampir semua aspek kini sudah mengalami digitalisasi sebagai bentuk jawaban atas perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Salah satu bentuk digitalisasi adalah munculnya platform software, mulai dari yang berbasis komputer hingga berbasis cloud. Perkembangan ini pun berdampak pada bidang auditing, dimana mulai muncul beberapa software yang berusaha membantu auditor dalam menyelenggarakan pekerjaannya. Meskipun demikian, tidak semua kantor KAP menggunakan platform ini.

Teknik audit berbasis komputer sebenarnya menjadi salah satu sarana untuk membantu auditor dalam menjalankan tugasnya karena penggunaan perangkat ini membuat proses audit menjadi lebih sederhana. Teknik ini juga sangat bermanfaat terutama dalam keadaan waktu yang terbatas, namun dengan catatan bahwa auditor memiliki kecakapan dan keterampilan yang memadai dalam memahami dan mengolah data menggunakan komputerisasi. Namun, realitanya tidak semua kantor KAP menggunakan teknik audit berbasis komputer. Kebanyakan KAP yang belum menggunakan teknik berbasis komputer berasal dari kantor-kantor kecil yang belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Keterbatasan yang dihadapi oleh beberapa kantor KAP ini mulai keterbatasan SDM hingga keterbatasan biaya. Artikel jurnal ini berusaha menguji teori atau hipotesis untuk memperkuat ataupun menolak teori atau hipotesis dari penelitian terdahulu. Fokus peneliti pada penelitian yang dituangkan dalam jurnal artikel ini adalah pengaruh kinerja dan kondisi fasilitas terhadap intensi auditor keuangan dalam menggunakan teknik berbantuan komputer. Penelitian ini melibatkan setidaknya 12 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di kota Padang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan diuji menggunakan SPSS, didapatkan hasil bahwa harapan kinerja berpengaruh secara parsial terhadap intensi auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi teknik audit berbasis komputer menjawab harapan kerja auditor, maka semakin tinggi intensi auditor untuk menggunakan audit berbantuan komputer. Secara rata-rata, para auditor setuju bahwa teknik berbasis komputer ini membantu dalam pekerjaan sehingga penyelesaian tugas lebih cepat dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, mengenai pengaruh kondisi fasilitas terhadap intensi auditor juga memiliki pengaruh secara parsial dimana rata-rata auditor sependapat bahwa kondisi fasilitas yang lengkap membuat kemudahan bagi auditor dalam melakukan pekerjaan menggunakan teknik ini sehingga intensi auditor untuk terus menggunakan teknik ini semakin tinggi. Secara khusus, penelitian ini mengindikasikan bahwa teknik audit berbantuan komputer dapat menjawab harapan kinerja auditor, dan kemudian menyebabkan auditor terus berencana menggunakan teknik audit berbantuan komputer saat bekerja. Hal ini juga berlaku bagi kondisi fasilitas dimana ketersediaan dan kelengkapan fasilitas teknologi dapat membuat kemudahan auditor dalam melakukan pekerjaan menggunakan teknik audit berbantuan komputer, hal ini dapat membuat kemudahan sehingga muncul intensi auditor untuk terus melakukan teknik audit berbantuan komputer.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menjadi salah satu bukti bahwa teknik audit berbasis komputer sebenarnya diperlukan oleh auditor karena mampu membantu pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaannya secara lebih mudah, cepat, efisien, dan juga efektif. Namun, tak dapat diabaikan juga jika alat pendukung yang dalam hal ini adalah kondisi fasilitas perlu diperhatikan pula. Kondisi fasilitas menjadi salah satu pendukung yang sangat diperlukan oleh auditor. Semakin lengkap dan baik kondisi fasilitas, maka akan meningkatkan motivasi bagi para auditor untuk menggunakan teknik audit berbasis komputer ini.

Teknik audit berbasis komputer ini sebenarnya memang membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya dan banyak dari auditor yang tertarik untuk menggunakan teknik ini, tetapi banyak kendala yang dialami sehingga auditor tidak dapat menggunakan teknik ini secara maksimal. Beberapa kendala ini dapat diatasi, misalnya saja mengenai kemampuan dan keterampilan auditor yang masih kurang dalam penggunaan teknik ini. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan mengenai teknik ini oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keterampilan para auditor ini. Selain itu, keterampilan ini juga membuat auditor memiliki skill baru yang meningkatkan kualitas dari para auditor. Selanjutnya, mengenai fasilitas sebenarnya

pihak manajerial dapat mendorong perusahaan audit untuk berinvestasi dalam infrastruktur organisasi dan teknis tambahan yang mendukung teknik audit berbantuan komputer, terutama untuk auditor yang kurang cenderung untuk mengadopsi sistem baru. Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa semua usaha ini dapat terjadi jika auditor juga memiliki kesadaran diri untuk terbuka dalam menerima skill baru yang akan diberikan

## **IDENTITAS JURNAL**

Nama Jurnal : Maneksi  
Judul Jurnal : Analisis Efektivitas Audit Tool and Linked Archive System  
dalam Menunjang Proses Audit Laporan Keuangan  
Volume : 10  
Nomor : 2  
Halaman : 169-177  
Tahun Terbit : 2021  
Nama Penulis : Mira Nur Haniifah dan Octavia Lhaksmi Pramudyastuti

## **ANALISIS JURNAL**

Audit berbasis komputer memiliki peranan yang penting bagi para auditor karena dapat membantu kinerja auditor. Penggunaan audit berbasis komputer ini berguna untuk meringkas penyimpanan file penyimpanan file-file audit dan mampu memperoleh informasi dengan cepat sehingga berdampak pada proses audit laporan keuangan berjalan secara efektif dan efisien. Melihat berbagai keuntungan dari penggunaan komputer dalam proses pengauditan, membuat penggunaannya semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kesiapan auditor dalam menghadapi era digital dimana semua aspeknya berkaitan dengan teknologi.

Semakin meningkatnya penggunaan komputer sebagai alat bantu memicu beberapa platform software kini bermunculan guna membantu tugas para auditor. Indonesia sendiri memiliki aplikasi yang membantu auditor dalam menjalankan proses dan standar audit. Aplikasi tersebut adalah ATLAS (Audit Tool and Linked Archive System) yang diluncurkan oleh Pusat Pembinaan Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan. Aplikasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang ditemukan terkait dengan audit berbasis risiko, metodologi audit berbasis risiko yang kompleks, dan proses dokumentasi prosedur audit. ATLAS sendiri berbasis Microsoft Excel sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikan hasilnya dalam pemberian opini.

Berkaitan dengan aplikasi ini, peneliti berupaya untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas aplikasi ATLAS dalam proses audit laporan keuangan yang kemudian dituangkan dalam artikel jurnal ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode yang menggunakan teknik wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada staff

auditor di salah satu KAP yang berada di Yogyakarta. KAP tersebut dipilih oleh peneliti karena proses pengauditan yang dilakukan oleh KAP terpilih sebagian besar dilakukan dengan aplikasi ATLAS.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa penerapan teknologi dalam proses auditing berpengaruh pada pengolahan data atau bukti audit. Sistem yang digunakan ini diharapkan mampu memberikan pengawasan yang ketat terhadap bukti audit karena sistem yang sudah terintegrasi. ATLAS adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dalam rangka pelaksanaan audit umum menjadi salah satu contoh penerapan teknologi informasi yang dibuat dengan tujuan untuk membantu akuntan publik dan auditor dalam memenuhi standar audit. ATLAS pertama kali dirintis pada November 2017 dan bertahap perbaikan hingga versi terakhir pada rintisan bulan Maret 2019. Aplikasi ini menyediakan tiga pilihan standar akuntansi, yaitu SAK Umum Konvergensi IFRS, SAKETAP, dan SAK EMKM. Aplikasi ini sendiri dirancang khusus untuk mengaudit perusahaan ukuran kecil, menengah, dan UMKM dengan standar keuangan yang bisa disesuaikan dengan standar yang digunakan oleh klien (Akashi & H, n.d.).

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ATLAS dianggap sudah efektif dalam menilai risiko dan mengidentifikasi awal materialitas menjadi lebih jelas. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dokumentasi terarah dan jelas, telah sesuai dengan standar dan ketentuan audit yang berlaku, merupakan kewajiban dari Kementerian Keuangan untuk menggunakan ATLAS, dan format menjadi general dan seragam. Penggunaan aplikasi ini juga mampu mempersingkat waktu dalam penilaian risiko dan menghasilkan tingkat risiko salah saji material klien yang lebih jelas karena aplikasi ini tersusun secara sistematis.

Aplikasi ATLAS memiliki banyak sekali keunggulan yang mampu membantu kinerja dari auditor, namun aplikasi ini juga memiliki beberapa kendala dalam pemakaiannya. Kendala yang dialami oleh auditor dalam menggunakan aplikasi ini, antara lain alur dan cara kerja sistem ATLAS yang sedikit rumit menyebabkan pengguna membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memahaminya. Selain itu, rumus yang ada dalam aplikasi ini sering hilang dengan sendirinya sehingga menyebabkan kesulitan bagi pengguna.

Penggunaan aplikasi ATLAS membawa dampak yang baik terutama bagi peningkatan kualitas audit. Hal ini terjadi karena sistem aplikasi ini tersusun secara lebih sistematis yang membuat dokumen lebih terarah dan jelas. Aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan tiga pilihan standar akuntansi sehingga dapat disesuaikan dengan standar yang digunakan oleh klien. Namun, dibalik semua kelebihan ini tentu ada kelemahan yang mengikuti. Kelemahan ini masih dapat diatasi dengan pelatihan yang dilaksanakan dengan pihak terkait atau dapat juga dengan perbaikan dan pembaruan aplikasi dengan versi yang lebih mutakhir sehingga dapat digunakan dengan lebih maksimal dan dapat membantu auditor secara lebih baik.

Penerapan aplikasi ATLAS tak hanya dapat digunakan oleh para auditor saja, tetapi juga dapat menjadi sarana pembelajaran bagi para mahasiswa. ATLAS menjadi media yang membantu pemahaman mahasiswa mengenai semua siklus audit. Setelah dilihat lebih jauh, keunggulan aplikasi ini tak hanya dapat dirasakan oleh praktisi terkait tetapi juga para mahasiswa yang sedang belajar untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja secara nyata. ATLAS sebagai media belajar memberikan beberapa keuntungan diantaranya peserta didik dapat termotivasi untuk menyelesaikan proyek audit secara nyata sehingga mendorong minat mahasiswa menjadi auditor, peserta didik juga menjadi lebih aktif karena mereka sudah diarahkan langsung tahapannya melalui ATLAS (Prajanto, 2020).

## **JURNAL INTERNASIONAL**

### **IDENTITAS JURNAL**

Nama Jurnal	: Corporate Ownership and Control
Judul Jurnal	: The Harmonising of Auditing Standards in Emerging Economies from The Stakeholders' Perspectives
Volume	: 15
Nomor	: 4
Halaman	: 201-212
Tahun Terbit	: 2018
Nama Penulis	: Ahmed Eltweri, Nedal Sawan, dan Abdulaziz R. Tahar

### **ANALISIS JURNAL**

Tekanan profesi audit kini semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Auditor diharapkan mampu mencapai keselarasan global dalam praktik audit. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan regulasi dan standar yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di setiap negara, tak terkecuali Libya. Penelitian ini berusaha menentukan perilaku kontemporer dan penentu praktik audit lokal dan menawarkan analisis tentang bagaimana pemangku kepentingan audit Libya memandang prospek mengadopsi standar audit yang harmonis atau mengembangkan seperangkat standar untuk penggunaan lokal.

Standar dan proses audit dalam suatu negara tidak bisa dipisahkan dari sejarah yang mengikutinya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa literatur yang tertuang dalam jurnal artikel ini disebutkan bahwa standarisasi dan pengaturan audit yang digunakan oleh Libya terkait dengan model Inggris dan Amerika Serikat. Alasannya kedua negara ini selama 70 tahun terakhir mengeksplorasi minyak dan berdampak pada penggunaan standar audit yang dipromosikan oleh keduanya. Oleh karena itu, praktik akuntansi dan audit di Libya mengikuti tren yang ditetapkan oleh Inggris dan Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil penelitian, Libya masih tertinggal dengan standar akuntansi dan audit nasionalnya. Tidak ada standar akuntansi dan audit yang diakui di Libya. Standar-standar yang digunakan di Libya diadopsi berdasarkan hasil preferensi akuntan

dan auditor mereka sehingga standar ini berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Standar yang mereka gunakan berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang mereka habiskan di luar negeri. Mereka yang berkesempatan mencari pengetahuan dan pengalaman dari luar negeri

lebih mampu mengadopsi standar internasional. Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan bagi mereka yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Libya dengan sifat yang terbatas. Perbedaan ini menimbulkan beberapa dampak, seperti kurangnya ketelitian dalam praktik akuntansi dan audit Libya. Kesenjangan ini juga menimbulkan pengetahuan dan keahlian yang tidak homogen.

Pendidikan akuntansi dan audit di Libya muncul pada tahun 1957 yang kemudian akuntansi menjadi program studi di Fakultas Ekonomi dan Perdagangan yang didirikan di Universitas Benghazi. Sistem pendidikan akuntansi ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris. Namun pada awal 1980-an, Libya mendirikan dua universitas lain yang kemudian menandai pergeseran model akuntansi dari Inggris ke model Amerika Serikat. Lembaga baru ini lebih mengadopsi buku teks dan mempekerjakan dosen yang berasal dari Amerika Serikat. Namun, adopsi ini menimbulkan masalah dimana kurikulum akuntansi tidak selaras dengan lingkungan Libya karena reori akuntansi barat dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan Libya.

Peningkatan lulusan akuntansi dari universitas setempat dan luar negeri berdampak pada banyaknya kantor akuntan baru yang dikelola oleh akuntan berkualifikasi lokal. Hal ini menyebabkan standar audit dan akuntansi dibutuhkan sebagai acuan para auditor. Kemudian, otoritas Libya membuat kerangka peratran dengan membentuk Libyan Accounting and Auditing Association (LAAA). LAAA didirikan pada tahun 1973 melalui Undang-Undang No. 116 Tahun 1973 yang memperkenalkan delapan bidang yang berkaitan dengan pengaturan praktik akuntansi dan audit. Meskipun sudah lebih dari 40 tahun didirikan, LAAA belum memberikan standar apapun untuk diikuti anggota atau sekedar merekomendasikan standar lain. Keterbatasan LAAA ini tentu saja berdampak negatif terhadap perekonomian Libya. Negara berkembang seperti Libya memerlukan perencanaan nasional dan kepatuhan terhadap perencanaan serta kebijakan fiskal dan moneter. Jauh sebelum LAAA didirikan, Libya sudah mendirikan State Accounting Bureau (SAB) yang bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan. SAB memiliki tanggung jawab audit untuk semua lembaga negara, departemen, dan lembaga lain yang menerima dukungan pemerintah lebih dari 25% dari modal mereka, untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini sejalan dengan undang-undang dan peraturan keuangan yang dirumuskan oleh otoritas. Sayangnya, IPC lemah dalam melaksanakan tugas pengawasannya karena kurangnya akuntan dan auditor yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut, dan akibatnya keterlibatan akuntan dan auditor swasta yang melangkah ke celah ini.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa praktik audit yang dilaksanakan Libya masih berada dalam keadaan yang kurang baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang kemudian dituangkan dalam artikel jurnal ini didapatkan informasi bahwa kualitas pekerjaan audit di Libya secara keseluruhan buruk. Hal ini pun disetujui sepertiga responden. Para pemangku kepentingan memiliki kepercayaan bahwa Libya harus menetapkan standar audit sendiri atau mengadopsi standar audit internasional yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di negara tersebut. Penyelarasan standar audit adalah salah satu cara untuk mencapai hasil keuangan yang positif dengan tingkat kredibilitas yang lebih besar dalam pelaporan keuangan.

Standar akuntansi memegang peranan yang penting baik bagi pihak internal maupun eksternal. Standar penting bagi masyarakat mana pun karena berfungsi untuk meningkatkan tingkat pengukuran, perbandingan, koordinasi, dan perlindungan informasi keuangan. Khususnya, mereka melindungi kepentingan pihak ketiga dengan menyediakan pengguna laporan keuangan dengan tolok ukur yang sama untuk membandingkan alternatif dan mencapai keputusan yang masuk akal. Standar juga penting bagi para akuntan dan auditor karena ketidakselarasan dalam penerapan standar akuntansi akan berdampak pada situasi dimana pengguna informasi menjadi tidak percaya akan laporan yang diberikan pada mereka. Standar diperlukan untuk menyeragamkan sehingga laporan tersebut menjadi terpercaya.

Standar akuntansi pun dapat berbeda di setiap negara karena berbagai pertimbangan yang terjadi. Standar akuntansi yang diterapkan merupakan hasil interaksi yang kompleks di antara faktor ekonomi, sejarah, kelembagaan, dan budaya (Maryono, 2010). Menurut McKinnon dalam (Yuesti & Saitri, 2021) menawarkan kerangka metodologis yang terintegrasi secara budaya untuk menganalisis perubahan dalam aturan pelaporan keuangan perusahaan di tingkat negara secara keseluruhan spesifik. Sebelumnya telah dijabarkan bahwa Libya belum mampu menetapkan standar bagi akuntansi dan auditing sehingga menyebabkan banyak permasalahan. Selama ini, Libya menggunakan standar yang ditetapkan oleh Inggris dan Amerika Serikat yang tentu saja berbeda kondisinya. Libya yang masih tergolong negara berkembang tentu akan berbeda dengan Inggris dan Amerika Serikat yang sudah berada di golongan negara maju.

Standar yang ditetapkan oleh setiap negara bisa jadi berbeda, namun standar diperlukan harmonisasi untuk menciptakan kepercayaan publik. Keselarasan ini tetap perlu dilakukan, mengingat keberagaman praktek akuntansi yang akan terjadi di masa depan. Keseragaman praktek akuntansi di berbagai negara tentu akan meningkatkan kualitas akuntansi internasional khususnya menyangkut dayabanding. Semakin homogen praktek akuntansi berarti kinerja

antar perusahaan di berbagai negara akan dengan mudah diperbandingkan melalui laporan keuangan yang mereka buat. Meskipun demikian, diperlukan penyesuaian dengan standar yang dibutuhkan dalam negara tersebut. Perbedaan budaya, sejarah, dan faktor-faktor pendukung lain harus tetap dijadikan pertimbangan ketika pihak terkait hendak menyelaraskan standar yang digunakan di negaranya dengan dunia internasional.

## **IDENTITAS JURNAL**

Nama Jurnal : Integritas  
Judul Jurnal : Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara  
Volume : 1  
Nomor : 1  
Halaman : 81-110  
Tahun Terbit : 2015  
Nama Penulis : RM Syah Arief Atmaja W. dan Agung Nur Probohudono

## **ANALISIS JURNAL**

Basis pengelolaan keuangan khususnya pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan yang baik, dan unsur terpenting adalah akuntabilitas. Bentuk nyata dari komitmen akuntabilitas pemerintah adalah pengumpulan dan pelaporan laporan keuangan pemerintah, yang dievaluasi keabsahan, keakuratan, keabsahan dan keandalan informasi dalam bentuk opini yang dikeluarkan oleh Kantor Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006.

Berdasarkan pemaparan peneliti diperoleh informasi selama tahun 2011-2012 persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2013 adalah sebanyak 23% yang mana meningkat 10% dari tahun 2012 sebanyak 13%. Sementara itu, persentase yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian pada tahun 2013 adalah sebanyak 62% yang manamenurun 5% dari tahun 2012 sebanyak 67%, opini Tidak Wajar (TW) pada tahun 2012 sama dengan tahun 2011 sebanyak 1%, dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2012 adalah sebanyak 14% mengalami penurunan 5% dari tahun 2011 sebanyak 19% .

Pada tahun 2013, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK menunjukkan sebanyak 5.307 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 1.918 kasus, sistem sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.257 kasus, dan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak

2.257 kasus. Kasus-kasus ini terjadi karena pada umumnya para pejabat pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan tugasnya. Pengendalian ini sangatlah penting karena melalui pengendalian internal akan meminimalkan tindak kecurangan yang berpotensi untuk merugikan negara.

Hasil pemeriksaan laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang menimbulkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, dan inefisiensi. Kerugian negara akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan sebanyak 7.282 kasus senilai Rp7.826.780,01 juta. Komponen terakhir yang diungkapkan BPK untuk menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan hukum. Kepatuhan terhadap perundang-undangan memiliki pengaruh dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang harus diperhatikan dalam menentukan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin banyak kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak baik, dan akuntabilitasnya juga tidak baik.

Kerugian negara merupakan berkurangnya kekayaan negara yang dapat berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Tindakan tersebut dapat terjadi ketika seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan finansial melalui penipuan atau penipuan. Penipuan semacam ini menunjukkan keinginan yang disengaja, terlepas dari ketidaktahuan. Association of Certified Fraud Examiners membagi kecurangan dalam tiga kelompok, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi dalam pengelolaan keuangan. Kecurangan akuntansi (fraud) mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan pembaca atau pengguna laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan salah saji akibat kesalahan penanganan aset (sering disebut sebagai penyalahgunaan atau penggelapan) terkait dengan pencurian aset entitas, sehingga laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Kerugian negara dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPK apabila ditemukan adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, baik dalam pelaksanaan anggaran maupun dalam pengelolaan dan operasional aset.

Penelitian ini sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh bukti secara empiris yang menjelaskan pengaruh langsung dari variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern, temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan temuan kerugian negara terhadap pemberian opini BPK. Penelitian ini juga dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan yang tepat waktu dan telah mendapatkan opini BPK dari tahun 2011 sampai dengan 2013 atas laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 dengan jumlah sebanyak 1559 opini sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2011 hingga 2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan peneliti dalam artikel jurnal tersebut menunjukkan hasil bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAK), ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum dan identifikasi kerugian oleh negara dapat mempengaruhi pertimbangan kesimpulan BPK, yang secara praktis penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Menurut hasil penelitian ini, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tepat dalam menetapkan kebijakan sehingga dapat meningkatkan penyediaan layanan publik secara lebih baik dan memenuhi akuntabilitas publik. Selain itu juga, penelitian ini memiliki implikasi bahwa lembaga negara lainnya, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang berperan sebagai pembuat kebijakan, lembaga pengawasan dan penegak hukum untuk memberikan skor tertinggi, serta penegak hukum yang konsisten untuk menciptakan pemerintahan daerah yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dan kebutuhan rakyat.

## **ARTIKEL**

### **IDENTITAS ARTIKEL**

Judul Artikel	: Kasus Proyek Fiktif, Eks Pejabat Waskita Karya Diduga Manipulasi Data Keuangan
Publikasi	: Tribun News
Tahun	: 2020
Penulis	: Ilham Rian Pratama
Website	: <a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/13/kasus-proyek-fiktif-eks-pejabat-waskita-karya-diduga-manipulasi-data-keuangan">https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/13/kasus-proyek-fiktif-eks-pejabat-waskita-karya-diduga-manipulasi-data-keuangan</a>

### **ANALISIS**

Mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar diduga memanipulasi data keuangan proyek-proyek subkontraktor fiktif. Tim penyidik KPK mendalami dugaan ini dengan memeriksa Yuly Ariandi sebagai tersangka terkait dengan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada 2020 lalu. Kasus ini juga menyeret lima mantan pejabat PT Waskita Karya, diantaranya mantan Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga, Desi Arryani; Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakhri Usman; Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman; serta Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

KPK tak hanya mendalami mengenai manipulasi data keuangan, tetapi juga aliran uang yang diduga diterima Yuly Ariandi dan empat tersangka lain dari sejumlah protek subkontraktor fiktif di Waskita Karya. Selain itu, tim penyidik juga memeriksa mantan Komisaris PT Aryana Sejahtera, Mohammad Hosen. PT Aryana Sejahtera merupakan salah satu dari empat perusahaan yang digunakan tersangka untuk mengerjakan sekitar 41 pekerjaan subkontraktor fiktif di 14 proyek yang digarap Waskita Karya. Tim penyidik melakukan penyidikan mengenai kegiatan operasional dan kontrak PT Aryana dengan PT Waskita Karya yang diduga fiktif.

Kasus ini bermula dari keputusan Desi Arryani pada 2009 atau saat menjabat sebagai Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk menyepakati pengambilan dana dari perusahaan BUMN tersebut melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada proyek-

proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II. Dalam rangka melaksanakan keputusannya tersebut, Desi kemudian memimpin rapat koordinasi internal terkait penentuan subkontraktor, besaran dana dan lingkup pekerjaannya. Kemudian, kelima tersangka melakukan tanda tangan dokumen kontrak dan juga pencairan dana pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut.

Selanjutnya, pada 2011, Desi mendapatkan promosi menjadi Direktur Operasional PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Fathor Rachman juga dipromosikan menjadi Kepala Divisi III/Sipil/II menggantikan Desi. Atas permintaan dan sepengetahuan dari kelima tersangka, kegiatan pengambilan dana milik PT Waskita Karya melalui pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut, dilanjutkan, dan baru berhenti pada tahun 2015.

Seluruh dana yang terkumpul tersebut digunakan oleh pejabat dan staf pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran resmi PT Waskita Karya (Persero), seperti pembelian peralatan yang tidak tercatat sebagai aset perusahaan, pembelian valuta asing, pembayaran biaya operasional bagian pemasaran, pemberian fee kepada pemilik pekerjaan (bowheer) dan subkontraktor yang dipakai, pembayaran denda pajak perusahaan subkontraktor, serta penggunaan lain oleh pejabat dan staf Divisi III/Sipil/II.

KPK juga memanggil 10 orang pegawai PT Waskita Karya terkait dengan kasus korupsi ini. Selain kelima tersangka, beberapa saksi yang dipanggil oleh KPK antara lain Kepala Seksi Administrasi Kontrak (Adkon) Proyek BKT paket 22 PT Waskita Karya Anton Victor, Kasie Keuangan Proyek Jembatan Aji Tulus Jejangkat PT Waskita Karya Soetrisno, Kepala Proyek Aji Tulus PT Waskita Karya Samsul Purba, Staf Keuangan PT Waskita Karya Budi Arman. Kemudian, Mantan Kepala Bagian Keuangan Divisi III PT Waskita Karya Haris Gunawan, Kepala Proyek Tol Nusa Dua- Ngurah Rai-Benoa Paket 4 PT Waskita Karya Benny Panjaitan, dan Pegawai PT Waskita Karya Eka Desniati.

KPK juga sempat menggeledah rumah Desi Aryani selaku Dirut Jasa Marga terkait kasus ini. Rumah milik Desi digeledah karena dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Operasi I PT Waskita Karya sebelum ditunjuk menjadi Dirut Jasa Marga. Selain Desi, KPK juga menggeledah rumah milik pensiunan PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah dilakukan penggeledahan, disia sejumlah dokumen penting terkait dengan kasus dugaan korupsi ini.

Setidaknya terdapat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif selama periode 2009-2015. Perusahaan yang diduga digunakan dalam pekerjaan fiktif ini, diantaranya PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering dan PT Aryana Sejahtera. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut sekitar Rp202 miliar.

Kasus diatas merupakan salah satu contoh kasus fraud atau kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pihak terkait. Kecurangan ini dapat dideteksi dengan melihat dari keganjilan akuntansi, penyajian laporan keuangan, perubahan kondisi pegawai, adanya pengaduan, dan melakukan audit internal serta audit eksternal. Faktor- faktor yang dapat menyebabkan kecurangan ini, diantaranya pengendalian internal, ketaatan standar akuntansi, dan kesesuaian kompensasi.

Pada kasus PT Waskita karya, fraud yang digunakan antara lain manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba, yang dilakukan oleh 3 Direksi PT Waskita Karya dan 2 Kantor Akuntan Publik (KAP). Manipulasi ini dilakukan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Kasus ini muncul kepermukaan ketika terjadi pergantian direksi. Dirut pengganti tidak menerima laporan keuangan manajemen lama yang kemudian meminta pada pihak ketiga untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu yang dicurigai.

Manipulasi yang dilakukan oleh PT Waskita Karya berdampak pada jatuhnya citra BUMN dan mengurangnya kepercayaan investor sehingga investor berpikir ulang dalam mempertahankan sahamnya. Selain itu, kasus ini juga menambah kasus kecurangan akuntansi perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada pandangan negatif bagi para auditor. Integritas auditor kembali dipertanyakan oleh masyarakat karena sejumlah kasus fraud yang dialami oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

## **IDENTITAS ARTIKEL**

Judul Artikel : Dirut KAI : BPKP Segera Audit Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat  
Publikasi : Media Indonesia  
Tahun : 2022  
Penulis : Insi Nantika Jelita  
Website : <https://mediaindonesia.com/ekonomi/440334/dirut-kai-bpkp-segera-audit-pembengkakan-biaya-proyek-kereta-cepat>

## **ANALISIS**

Mega proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan. Proyek ini disebut-sebut tengah menghadapi sejumlah persoalan salah satunya pembengkakan biaya. Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady menyebutkan bahwa proyek ini amburadul karena tidak adanya kejelasan mengenai dana pembangunan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan segera diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas usulan Komisi VI DPR yang didukung oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Hal ini dilakukan terkait dengan adanya pembengkakan biaya (cost overrun) hingga US\$1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun pada proyek tersebut. Pembengkakan biaya disinyalir berasal dari masalah pembebasan lahan yang membuat stasiun Walini ditunda jadi tempat transit.

Sebelumnya, proyek kereta cepat Indonesia China diizinkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengambil dari APBN. Peraturan ini tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta-Bandung. Berdasarkan peraturan tersebut, PT Kereta Api Indonesia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Proyek ini diketahui memerlukan dana tambahan, sehingga dana penuntasan proyek tersebut membengkak. Menurut peraturan yang ini juga diberikan izin penambahan biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung dari APBN.

Secara kronologis pembekakan ini terjadi karena KCJB mengalami cost overrun yang diperkirakan antara US\$3,8 miliar-US\$4,9 miliar atau setara Rp54 triliun- Rp 69 triliun. Namun, sejak kajian yang dilakukan dengan bantuan konsultan, perhitungannya justru melebar hingga US\$8,6 miliar. Selanjutnya, KCIC mengajukan penundaan setoran modal dasar sebesar

Rp4,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Meski demikian, KCIC belum menerima balasan dari CDB. Didiek mengakui komunikasi antara perwakilan Indonesia dan China tak berjalan mulus. Padahal, pengerjaan PSN tersebut masih panjang. KAI pun mendukung usulan Komisi VI untuk dilakukan audit investigatif atas perkara pendanaan proyek.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, dalam proyek konstruksi ini diduga kontribusi paling besar untuk biaya adalah pembebasan lahan yang dinilai tak transparan. Pembengkakan ini juga terjadi karena adanya perlambatan bahan baku yang sebagian besar diimpor dari negara lain sebagai akibat dari pandemi. Lebih lanjut Bhima memberi dua opsi, yang pertama adalah penyertaan modal negara pada konsorsium atau opsi kedua yang sama saja ujungnya ada risiko komprehensi yang ditujukan ke negara juga BUMN. Menurut Bhima pula pemerintah dari awal tidak konsisten untuk pemakaian modal.

Sementara itu, menurut Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno pembengkakan biaya pembangunan proyek infrastruktur kereta api merupakan hal yang biasa terjadi. Pada kasus ini disebutkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor terganggunya arus kas para perusahaan yang menjadi anggota konsorsium proyek ini. Oleh karena itu, Djoko Setijowarno menyarankan agar para pemangku kepentingan untuk lebih teliti dalam kajian, khususnya dalam hal keuangan.

Selanjutnya Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, berpendapat bahwa audit harus dilakukan terlebih dahulu untuk selanjutnya menentukan jumlah dana yang timbul untuk menyelesaikan proyek kereta cepat. Saat ini KCIC terdiri dari dua konsorsium. Pertama, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang berisi sejumlah perusahaan pelat merah Indonesia di dalamnya. Secara komposisi saham, PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 38 persen, kemudian KAI 25 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB. Kedua, konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 40 persen. Konsorsium ini terdiri atas lima perusahaan, yakni CRIC dengan saham 5 persen, CREC sebanyak 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRCC 12, dan CRSC 10,12 persen. Sementara itu, di internal konsorsium Indonesia, dinilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat mengingat perseroan adalah BUMN di sektor konstruksi dan bukan perkeretaapian.

Pelaksanaan audit ini sudah tercantum dalam Perpres 91/2021 pasal 5 poin c yang mana menyebutkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir akan menelaah hasil review BPKP dan menyampaikan kepada komite yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian akan ditunjuk konsultan independen untuk melaksanakan kajian serta memberikan masukan untuk penyusunan struktur pendanaan dalam usaha penyelesaian cost overrun. Hasil audit ini ditargetkan oleh Kementerian BUMN akan diselesaikan pada Desember 2021. Hasil audit ini utamanya untuk memperjelas tambahan biaya akibat masalah pembebasan lahan dan adanya perubahan desain kondisi geografis serta geologis.

## **IDENTITAS ARTIKEL**

Judul Artikel : Skandal Jiwasraya dan Nasib Hasil Audit BPK  
Publikasi : Warta Pemeriksa BPK  
Tahun : 2021  
Penulis : Wahyu Kuncoro SN  
Website : <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=20834>

## **ANALISIS**

PT Asuransi Jiwasraya terlibat kasus kegagalan pembayaran sehingga menjadi ajang penyedotan keuntungan secara besar-besaran. Jiwasarta diduga bermasalah sejak tahun 2006 dengan memanipulasi laporan keuangannya. Meski mencatatkan laba, namun laba itu disebut semu karena adanya rekayasa akuntansi. BPK pada saat melakukan pemeriksaan keuangan kala itu lantas memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan PT Jiwasraya juga semakin lebar, yakni Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009. Kondisi keuangan Jiwasraya terus memburuk yang akhirnya berujung pada kasus gagal bayar polis yang membuat kebobrokan itupun terkuak.

Kasus megaskandal PT Asuransi Jiwasraya bermula pada Agustus 2020, kasus penyelewengan dana nasabah asuransi dan investasi 'JS Saving Plan' yang merugikan negara Rp 12,16 triliun. JS Saving Plan adalah produk investasi dan asuransi yang diperkenalkan pada Desember 2012 dengan perjanjian return investasi sebesar 9% - 13%. Pada Oktober – November 2018, Jiwasraya mengumumkan secara terbuka ketidak mampuannya membayar polis asuransi nasabah yang telah jatuh tempo dengan jumlah Rp 802 miliar kemudian di bulan September 2019 Jiwasraya mengalami tekanan liquiditas dan ekuitas dengan minus 23,92 triliun selanjutnya pada bulan November 2019, Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah melihat laporan keuangan perusahaan yang tidak transparan, Desember 2019 Kejagung menyatakan bahwa terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jaksa Agung menyatakan Jiwasraya menempatkan 95 dana investasi pada aset-aset dengan resiko tinggi. Kejaksaan Agung menyakan telah menyita aset terkait kasus Jiwasraya sebesar Rp 18,4 triliun. Nilai ini tentu lebih tinggi dari nilai kerugian investasi Jiwasraya yang ditetapkan BPK Rp 16,8 triliun.

Pada 2006, BPK menemukan hasil investigasi terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi pendapatan dan biaya operasional tahun 2015–2016. Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP. Investasi tersebut tidak didukung oleh kajian komprehensif atas usulan penempatan saham yang memadai. Saham-saham ini dinilai merugikan negara sebesar Rp 4 triliun. Selain pada saham, Jiwasraya juga menyembunyikan kebobrokan pengelolaan dana investasi pada reksadana. Juni 2018, Jiwasraya diketahui memiliki 28 produk reksadana dengan 20 diantaranya merupakan produk reksadana berkualitas rendah dan tidak likuid yang merugikan negara hingga Rp 6,4 triliun.

Menteri BUMN, Erick Thohir juga mengaku telah mencium dugaan skandal ini sejak dilantik menjadi Menteri BUMN. Persoalan ini diharapkan tidak hanya terpaku pada penegakan hukum, tetapi juga kerugian yang dialami nasabah Jiwasraya. Dana para nasabah harus dikembalikan sebagai upaya terbaik. Hak para nasabah harus dikembalikan karena nasabah adalah salah satu korban yang harus diperhatikan.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah pembiaran ketidakberesan dalam pengelolaan keuangannya, meskipun sudah diingatkan oleh BPK jauh-jauh hari. Menurut undang-undang, wewenang BPK hanya berhenti pada penyerahan hasil pemeriksaan tersebut pada legislatif, pemerintah, dan lembaga yang diaudit. Walaupun BPK memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, hasil pemantauan tersebut diserahkan kembali kepada legislatif dan pemerintah. Secara hukum, BPK tidak mampu memaksa suatu lembaga untuk melaksanakan hasil pemeriksaannya dan tidak ada hukum yang mengatur jika hasil pemeriksaan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Berdasarkan penjelasan tersebut, butuh sinergi dan komitmen yang kuat dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini. Banyak kasus yang sebenarnya sudah tercium, namun pihak-pihak terkait tidak menindaklanjuti dugaan ini secara maksimal. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang tentu saja harus

terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi dalam LKPD harus dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya, yang menurut SAP dinyatakan bahwa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, pemberi pinjaman, pemerintah, dan

pihak lain yang berkepentingan. Jika kita beranalogi dengan kegiatan ekonomi, maka terdapat kemiripan dengan kegiatan perdagangan saham di pasar modal. Di pasar modal, perusahaan-perusahaan akan belomba menarik hati investor agar mau berinvestasi pada saham yang diterbitkannya. Salah satu perhatian utama investor di pasar modal sebelum berinvestasi adalah laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit dan diterbitkan opini audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Investor sangat tergantung pada opini audit dalam pengambilan keputusan investasi, karena itu peranan KAP di pasar modal sangat strategis dan dapat berkontribusi menentukan nasib ribuan investor dan calon investor. Begitu juga dengan pemerintah daerah, setiap tahun LKPD diaudit oleh BPK yang kemudian juga diterbitkan opini auditnya.

Dengan demikian, ibaratnya seorang investor di pasar modal, sebenarnya rakyatpun bisa saja menentukan keputusan politiknya dengan dasar opini audit yang diterbitkan oleh BPK. Agar bangsa ini bisa hidup mulia tanpa korupsi, kesadaran masyarakat harus ditransformasikan menjadi gerakan sosial yang bisa menangkal dan melawan korupsi. Melalui gerakan sosial menangkal korupsi itu, public akan terlibat dalam pengawasan praktik korupsi yang dilakukan penyelenggara negara yang mempunyai kekayaan tidak sebanding dengan penghasilannya.

## IDENTITAS ARTIKEL

Judul Artikel : KPK Dorong Anggota G20 Tingkatkan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi  
Publikasi : Kompas.com  
Tahun : 2022  
Penulis : Irfan Kamil  
Website : <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/11212731/kpk-dorong-anggota-g20-tingkatkan-peran-audit-dalam-pemberantasan-korupsi>.

## ANALISIS

*Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20* digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28-31 Maret 2022. Pada hari pertama pertemuan ini membahas mengenai isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendorong negara-negara tergabung dalam *Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20* untuk meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyampaikan bahwa pertemuan ACWF pada hari pertama dimulai dengan pembahasan upaya pemberantasan korupsi oleh negara-negara Anggota G20. Lili berharap dan mengajak anggota G20 untuk berperan aktif membangun momentum selama pertemuan ACWG agar dapat bekerja secara efektif dan mencapai kesepakatan tentang upaya pemberantasan korupsi di seluruh dunia.

Pertemuan ACWG selain dihadiri oleh para delegasi peserta G20, juga diikuti oleh kelompok partisipasi, yaitu B20, C20, T20, L20, dan P20. Pertemuan hari pertama tersebut dibagi menjadi empat sesi, dengan panelis dari Presidensi G20 Indonesia yang akan diwakili oleh KPK, delegasi dari Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, juga terdapat panelis lainnya yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Australia Accountability Lab, serta perwakilan dari kelompok partisipasi B20, C20, T20, L20, dan P20.

Menurut Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana, lebih lanjut menjelaskan bahwa audit merupakan elemen sentral dari sistem akuntabilitas dan integritas. Oleh karena itu lembaga audit, akuntan, dan auditor swasta berperan penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pembahasan masalah ini dapat membantu memberdayakan badan

audit sektor publik dan swasta untuk memerangi korupsi secara efektif; memperkuat peran dan kapasitas badan audit sektor publik dan auditor internal untuk mendeteksi, mencegah dan, jika perlu, menyelidiki korupsi; mendorong auditor swasta untuk berperan aktif dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan korupsi; mengembangkan kerangka kerja yang baik untuk melacak dan mengimplementasikan temuan audit terkait korupsi; penguatan kerjasama antara lembaga audit, audit internal, lembaga anti korupsi/penegak hukum dan lembaga terkait lainnya dalam pemberantasan korupsi; dan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan peran audit, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Selanjutnya Lili sebagai perwakilan KPK juga menyampaikan KPK selama ini telah berupaya meningkatkan peran audit dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Contohnya, dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit investigatif perkara korupsi yang ditangani KPK. KPK dan BPKP juga telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada awal Januari 2020. Isi MoU itu mencakup 5 poin. Salah satunya, berisi kesediaan BPKP memberi bantuan peningkatan sumber daya manusia (SDM) KPK.

Selain membahas pentingnya peran audit dalam pemberantasan korupsi, isu utama lain yang dibahas ACWG G20 adalah mempromosikan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi. Partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi dinilai memiliki peran penting dalam penindakan sekaligus pencegahan korupsi. Melihat peran penting publik dan pendidikan dalam pemberantasan korupsi, KPK mulai melibatkan masyarakat untuk memantau kualitas pelayanan publik di lingkungan sekitarnya melalui aplikasi Jaringan pencegahan korupsi (JAGA). Melalui platform JAGA yang tersedia dalam bentuk aplikasi dan website, masyarakat dapat bertanya, menyampaikan pendapat, masukan, dan komentar, khususnya pelayanan publik yang tidak sesuai dengan data di JAGA.

Isu yang dibahas pula dalam pertemuan ini adalah peningkatan pemberdayaan profesional dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang. TPPU menjadi salah satu isu prioritas ACWG G20 lantaran aset hasil korupsi rentan disembunyikan dengan cara pencucian uang. KPK mencatat, sejak 2012 hingga 2021, KPK telah menangani sejumlah 45 perkara TPPU. Kerentanan TPPU sebagai tindak lanjut kejahatan korupsi juga dikuatkan dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2021. Dalam temuan itu, korupsi menempati urutan pertama sebagai tindak pidana asal terjadinya TPPU di Indonesia. Oleh

karena itu, perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan profesional dalam rangka pemberantasan TPPU.

Terakhir, isu yang disampaikan KPK adalah mempromosikan komitmen pemberantasan korupsi di bidang energi terbarukan (*Promoting Anti-Corruption in the Renewable Energy*). Isu tersebut diusung karena banyaknya negara yang sedang melakukan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan. KPK juga mendorong pencegahan korupsi di sektor energi terbarukan, yaitu dengan cara memberikan pendampingan dan rekomendasi diantaranya kepada PT PLN (Persero) agar proses bisnisnya lebih transparan, handal, efisien, dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA:

- Adelia, A., Putri, A., & Aini, C. N. (2021). Penerapan Teknologi Informasi Pada Proses Auditing di Era Digital. *E-Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(1), 34–38.
- Akashi, T., & H, B. (n.d.). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN APLIKASI SISTEM AUDIT AUDIT TOOL AND LINKED ARCHIVE SYSTEM (ATLAS) (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur) . *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1–13. Retrieved May 11, 2022, from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6713/5825#>
- Fadillah, S. D. A., Zulaikha, T. S. A., & Ilhami, T. Y. (2021). Peran dan Manfaat Implementasi Information Technology (IT) dalam Audit Internal. *E-Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(1), 1–8.
- Hamidah, S. N., P., U. N. M., & Fahmisyah, W. (2021). Implementasi Teknologi Informasi Dalam Perusahaan Dan Audit Sebagai Bentuk Revolusi Bisnis Pada Era Digital. *E-Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(1), 17–23.
- Haniifah, M. N., & Pramudyastuti, O. L. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS AUDIT TOOL AND LINKED ARCHIVE SYSTEM DALAM MENUNJANG PROSES AUDIT LAPORAN KEUANGAN. *Maneksi*, 10(2), 169–177.
- Maryono. (2010). HARMONISASI AKUNTANSI INTERNASIONAL: DARI KEBERAGAMAN MENUJU KESERAGAMAN. *Kajian Akuntansi*, 2(1), 77–91.
- Murfidyah, A., Suntoro, A. N. V., Putri, A. A., & Putri, C. K. (2021). Penerapan Audit Berbasis IT di Era Digital: Peluang atau Tantangan? *E-Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 1(1), 24–33.
- Prajanto, A. (2020). PROJECT BASED LEARNING SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN RISK BASED AUDIT DENGAN MEDIA APLIKASI AUDIT TOOL LINKED ARCHIVE SYSTEM (ATLAS) . *JAKA* , 1(1), 18–28. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka/article/view/3860/1988#>
- Ulfa, A. (2021). PERCEPTIONS OF FINANCIAL AUDITORS ON THE USE OF COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 297–307. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Yuesti, A., & Saitri, P. W. (2021). *AKUNTANSI INTERNASIONAL: Vol. CV*. Noah Aletheia.